

KLIPING BERITA MEDIA MASSA

Jum'at, 2 Agustus 2019



BADAN PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM
DAN PERUMAHAN RAKYAT

DAFTAR ISI

No	Media	Tanggal	News Title	Resume
1	Kompas (Halaman 10)	Jum'at, 2 Agustus 2019	Mitigasi Bencana sebagai Acuan Pembangunan	Mayoritas infrastruktur public dan industry berada di zona rawan bencana. Karena itu, mitigasi bencana mesti menjadi acuan dalam investasi pembangunan.
2	Media Indonesia (Halaman 3)	Jum'at, 2 Agustus 2019	Ibukota Baru Dibangun dari Nol	Kota tersebut nantinya harus berorientasi kepada publik dengan terdapat transportasi publik yang menunjang sepeda dan pejalan kaki. Jadi kota yang harus tidak bergantung kepada kendaraan pribadi.
3	Kompas (Halaman 18)	Jum'at, 2 Agustus 2019	Kampung di 13 RW Bakal Tak Kumuh Lagi	Sebanyak 13 rukun warga kumuh di Jakarta Selatan menjadi target penataan kampung dalam program community action plan tahun 2019.
4	Kompas (Halaman 14)	Jum'at, 2 Agustus 2019	Berita Foto	Labuan Bajo menjadi salah satu destinasi wisata utama di Indonesia.
5	Kompas (Halaman 13)	Jum'at, 2 Agustus 2019	Berita Foto	PT Jasa Marga (Persero) Tbk menargetkan konstruksi jalan tol layang Jakarta-Cikampek II bisa selesai pada September 2019.
6	Bisnis Indonesia (Halaman 7)	Jum'at, 2 Agustus 2019	KEPADATAN JALUR PUNCAK: Jalan Baru Disiapkan	Kementerian PUPR serta Kementerian Perhubungan akan turun tangan mengurai kepadatan lalu lintas di jalur Puncak, Bogor. Dalam jangka panjang, akan ada penambahan jalan baru.
7	Bisnis Indonesia (Halaman 7)	Jum'at, 2 Agustus 2019	Astra Kaji Pembangunan Jalan Tol Plus Dermaga	Astra Infra, lini usaha PT Astra International Tbk. di sektor infrastruktur tengah mengkaji pembangunan jalan tol yang terintegrasi dengan dermaga penyeberangan di Merak, Banten.
8	Bisnis Indonesia (Halaman 7)	Jum'at, 2 Agustus 2019	Berita Foto	Alat berat digunakan pada proyek jalan tol Serang-Panimbang di Kampung Cisangu, Lebak, Banten, Selasa (30/7).
9	Bisnis Indonesia (Halaman 7)	Jum'at, 2 Agustus 2019	KAWASAN DANAU TOBA: 5 Embung Dibangun di Samosir	Untuk mendukung pengembangan KSPN Danau Toba, Sumatra Utara, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) membangun sejumlah infrastruktur pendukung dan pembangunan lima embung di Pulau Samosir untuk menambah pasokan air baku.
10	Bisnis Indonesia (Halaman 10)	Jum'at, 2 Agustus 2019	Atur Strategi demi Kejar Ambisi 7%	Dalam pepatah Jawa terkenal istilah alon-alon waton kelakon. Artinya kurang lebih bergerak perlahan tetapi pasti, atau tidak terburu-buru dalam bertindak.
11	Koran Tempo (Metro Halaman 1)	Jum'at, 2 Agustus 2019	Jalan Tol Cijago Seksi II Siap Dioperasikan	Pembangunan ruas jalan tol Cinere-Jagorawi (Cijago) seksi II sepanjang 5,5 kilometer telah rampung dan siap dioperasikan.

Judul	Mitigasi Bencana sebagai Acuan Pembangunan	Tanggal	Jum'at, 2 Agustus 2019
Media	Kompas (Halaman 10)		
Resume	Mayoritas infrastruktur public dan industry berada di zona rawan bencana. Karena itu, mitigasi bencana mesti menjadi acuan dalam investasi pembangunan.		

Mitigasi Bencana sebagai Acuan Pembangunan

Mayoritas infrastruktur publik dan industri berada di zona rawan bencana. Karena itu, mitigasi bencana mesti menjadi acuan dalam investasi pembangunan.

JAKARTA, KOMPAS — Investasi pembangunan harus merujuk pada pengurangan risiko atau mitigasi bencana agar bangunan tak menambah kerentanan warga. Karena itu, butuh pengawasan ketat dan penegakan hukum bagi pihak yang melanggar standar bangunan.

Menurut Deputy Bidang Sistem dan Strategi Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Wisnu Widjaja, Kamis (1/8/2019), dalam seminar nasional "Membangun Ketangguhan Infrastruktur Berkelanjutan", di Jakarta, bencana tidak hanya urusan kemanusiaan, tetapi juga investasi pembangunan. Selain sistem peringatan dini, investasi pembangunan jadi elemen penting pengurangan risiko bencana.

Pada kesempatan sama, Kepala BNPB Doni Monardo meresmikan Ruang Serba Guna Sutopo Purwo Nugroho di lantai 15 Graha BNPB yang disaksikan Retno Utami, istri mendiang Kepala Pusat Data Informasi dan Hubungan Masyarakat Sutopo Purwo Nugroho, dan keluarga.

Penghargaan bagi insan media Citra Dharma Bhakti atau Indan dengan Pengabdian Bidang Jurnalistik diberikan kepada Ahmad Arif, jurnalis harian *Kompas*, atas beberapa karyanya terkait kebencanaan sehingga mengubah perspektif warga soal bencana.

Penghargaan Dharma Widya Argya diberikan kepada Sutopo Purwo Nugroho karena menyumbangkan ilmu pengetahu-

an bagi kemanusiaan bidang kebencanaan meski terkena kanaker. Penghargaan Reksa Utama Anindha atau penjaga bumi penuh kebijakan diberikan kepada Mbah Sadiman (68) asal Dusun Dali, Desa Geneng, Kabupaten Wonogiri, karena menghidupkan perbukitan tandus seorang diri.

Solusi rawan

Wisnu mengatakan, pembangunan harus merujuk pada pengurangan risiko bencana agar pembangunan bisa mengurangi kerentanan, bukan malah menambahnya. Kini 75 persen infrastruktur industri dasar dan konektivitas, termasuk prasarana pendukungnya, dibangun di zona bahaya bencana. Contohnya Kota Bitung, Sulawesi Utara, yang dikembangkan sebagai pelabuhan, memiliki potensi tsunami, tetapi banyak pihak belum menyadarinya.

Selain itu, 497.576 sekolah di 34 provinsi ada di area bahaya bencana. Artinya, lebih dari 10 juta siswa berisiko terdampak bencana. Karena itu, struktur bangunan sekolah itu harus diperkuat. "Harus ada sanksi bagi pihak yang melanggar standar bangunan agar tak seenaknya membangun," ujarnya.

Menurut Wisnu, sejumlah langkah bisa diterapkan untuk mengurangi risiko bencana, di antaranya dengan memahami ancaman bencana. Risiko itu harus dikelola lewat regulasi sebelum memulai investasi pembangunan. Langkah lain ialah latihan menghadapi ancaman

bencana. "Perlu pengawasan keselamatan bangunan, baik dari desain maupun kelayakannya. Inspeksi harus rutin dilakukan," katanya.

Rektor Universitas Syiah Kuala Aceh Samsul Rizal memberi gambaran gempa bumi di Pidie Jaya, Aceh, 7 Desember 2016. Banyak bangunan yang dibangun setelah gempa dan tsunami Aceh tahun 2004 kembali hancur. Ternyata, mayoritas bangunan masih rentan bencana.

"Kerusakan bangunan kebanyakan terjadi di lantai satu karena tulang bangunan patah," ujarnya. Bangunan-bangunan itu belum memenuhi Standar Nasional Indonesia, antara lain, tata cara perencanaan ketahanan gempa bagi struktur bangunan dan tata cara pengerjaan konstruksi. Sebab, meski ada aturan, tidak ada yang mengawasi.

Doni Monardo mengatakan, butuh langkah preventif menghadapi ancaman bencana. Kuncinya adalah edukasi dan sosialisasi harus rajin diberikan oleh banyak pihak, bukan hanya pemerintah. "Pemerintah, masyarakat, pelaku usaha, atau tokoh masyarakat harus rajin mengedukasi," ujarnya.

Selama 20 tahun terakhir, Indonesia menduduki peringkat kedua korban bencana terbanyak setelah Haiti. Tercatat lebih dari 160.000 korban selama 20 tahun terakhir. Tahun lalu Indonesia menempati urutan pertama korban bencana terbanyak dunia. (FRD)

Judul	Ibukota Baru Dibangun dari Nol	Tanggal	Jum'at, 2 Agustus 2019
Media	Media Indonesia (Halaman 3)		
Resume	Kota tersebut nantinya harus berorientasi kepada publik dengan terdapat transportasi publik yang menunjang sepeda dan pejalan kaki. Jadi kota yang harus tidak bergantung kepada kendaraan pribadi.		

Ibu Kota Baru Dibangun dari Nol

Kota tersebut nantinya harus berorientasi kepada publik dengan terdapat transportasi publik yang menunjang sepeda dan pejalan kaki. Jadi kota yang harus tidak bergantung kepada kendaraan pribadi.

DERO IQBAL MAHENDRA
dero@mediaindonesia.com

Pemerintah menegaskan bahwa pemindahan ibu kota negara terkait dengan upaya untuk membangun pusat pemerintahan baru ketimbang memindahkan ke kota *eksisting*. Menurut Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Bambang Brodjonegoro, pemerintah akan membangun pusat pemerintahan tersebut di lahan kosong yang belum memiliki kegiatan. "Kita ingin bangun pusat pemerintahan. Kalau sudah selesai menjadi ibu kota negara. Kalau di dalam termin perencanaan wilayah disebut sebagai *purpose built capital* (PBC) atau ibu kota yang disusun dari nol," ungkapnya dalam diskusi di Gedung Bappenas Jakarta, kemarin.

Ia menjelaskan, berdasarkan pengalaman dari sejumlah negara, pihaknya telah merumuskan sejumlah acuan dalam pembangunan pusat pemerintahan baru tersebut. Contohnya, kota yang dibangun tersebut hanya terfokus kepada pusat pemerintahan sehingga pembangunannya terkendali.

"Khususnya berkaitan dengan perkembangan kota ke depannya yang diharapkan perkembangannya dapat dikendalikan sesuai dengan indikator tertentu. Untuk itu diperlukan suatu manajemen pertumbuhan kota yang betul-betul dapat mengendalikan hal tersebut," paparnya.



PEMINDAHAN IBU KOTA: Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro (kedua dari kanan) bersama Menteri PU-Pera Basuki Hadimuljono (kanan), perwakilan ITB Ridwan Sutriadi (kiri), dan Ketua Umum Ikatan Arsitek Indonesia Ahmad Djuhana saat menjadi pembicara pada Dialog Nasional Ketiga Pemindahan Ibu Kota Negara, di Gedung Bappenas, Jakarta, kemarin. Pemerintah menargetkan pemindahan ibu kota ke Kalimantan dilaksanakan pada 2024.

Selain itu, tambahnya, ibu kota baru harus mampu merepresentasikan sebagai ibu kota bangsa, baik dari monumennya, museum maupun galeri budaya. "Secara sifatnya juga harus inklusif atau terbuka untuk semua, dengan tidak boleh ada pembatasan," tegasnya.

Bambang menegaskan, pembangunan kotanya nanti akan mengedepankan pendekatan lingkungan dengan konsep *forest city*. Terutama

karena lokasi ibu kota tersebut akan berada di Kalimantan yang dikenal sebagai paru-paru dunia. Selain itu Bambang juga menekankan kota tersebut nantinya harus berorientasi kepada publik.

"*Public transportation* yang menunjang, sepeda dan pejalan kaki, jadi kota yang tidak bergantung kepada kendaraan pribadi. Pada intinya, kita akan menerapkan *integrated city* dengan *integrated*

transportation dan *smart water management system*," pungkasnya.

Segera diumumkan
pada kesempatan lain, Presiden Joko Widodo akan menyampaikan lokasi persis ibu kota baru begitu setelah seluruh kajian selesai. "Akan diumumkan kalau sudah waktunya kalau kajian sudah komplet, dan masalah-masalah yang ada sudah selesai baru saya sampaikan di mana,"

kata Presiden di stasiun Moda Raya Terpadu (MRT) Bunderan Hotel Indonesia, kemarin.

Presiden Jokowi sebelumnya mengakui ibu kota Negara Republik Indonesia akan dipindahkan dari Jakarta ke salah satu tempat di Pulau Kalimantan.

"Belum, nanti akan diumumkan kalau sudah waktunya," jawab Presiden saat ditanya soal Kalimantan Timur menjadi lokasi ibu kota.

Terkait dengan pendanaan, politikus Partai Gerindra Andre Rosiade mempertanyakan pembiayaan pembangunan ibu kota baru yang akan dilakukan pemerintah. "Dana APBN kita tidak akan cukup menanggung biaya pembangunan sekitar Rp466 triliun karena kondisi penerimaan pajak yang rendah dan kebutuhan belanja yang cukup besar dalam lima tahun ke depan," ujarnya. (Ths/Ant/P-4)

MARLUS ERIANGGA

Judul	Kampung di 13 RW Bakal Tak Kumuh Lagi	Tanggal	Jum'at, 2 Agustus 2019
Media	Kompas (Halaman 18)		
Resume	Sebanyak 13 rukun warga kumuh di Jakarta Selatan menjadi target penataan kampung dalam program community action plan tahun 2019.		

PENATAAN KOTA

Kampung di 13 RW Bakal Tak Kumuh Lagi

JAKARTA, KOMPAS—Sebanyak 13 rukun warga kumuh di Jakarta Selatan menjadi target penataan kampung dalam program *community action plan* tahun 2019. Penataan kampung kumuh diharapkan tidak sekadar program mempercantik kawasan, tetapi juga meningkatkan kualitas hidup warga.

Kepala Suku Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Jakarta Selatan Herry Poernama, Kamis (1/8/2019), mengatakan, sesuai data Badan Pusat Statistik 2017, ada 11 variabel RW kumuh. Variabel itu antara lain kepadatan penduduk, kualitas bangunan buruk, ventilasi dan pencahayaan buruk, jamban buruk, cara membuang sampah, kondisi saluran air, permukaan jalan, serta penerangan jalan umum.

Penataan permukiman kumuh meliputi aspek fisik lingkungan, sosial, dan ekonomi. "Kami punya konsultan di sembilan kelurahan yang mendampingi warga memetakan masalah. Konsultan menyelenggarakan diskusi grup terarah (FGD) bersama warga untuk mencari solusi," ujar Herry.

Kampung sasaran *community action plan* berada di Kelurahan Ragunan, Pejaten Barat, Pejaten Timur, Kebayoran Lama Selatan, Kebayoran Lama Utara, Cipulir, Cilandak Barat, Gandaria Selatan, dan Pondok Pinang. Pendampingan oleh konsultan dilakukan selama sembilan bulan. Adapun proyek fisik penataan kampung dimulai 2020. "Anggaran untuk sewa konsultan sekitar Rp 400 juta setiap kelurahan," ucap Herry.

Konsultan pendamping warga di kampung kumuh mengungkapkan, masalah yang ditemui di kampung kumuh antara lain drainase, ketersediaan ruang terbuka hijau, dan banjir.

Farid, konsultan warga Pejaten Timur, mengatakan, di wilayah ini, isu yang muncul adalah normalisasi Kali Ciliwung dan ketersediaan ruang terbuka hijau. Kawasan ini berada di bantaran Kali Ciliwung dan langganan banjir. Beberapa rumah milik warga sudah dibebaskan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, tetapi beberapa warga memilih bertahan.

"Jika normalisasi Kali Ciliwung dijalankan, ada sebagian RT yang hilang di sana. Namun, kekumuhan wilayah justru terselesaikan dengan program normalisasi kali," kata Farid.

Herman, konsultan di Kebayoran Lama Selatan, menemukannya masalah serupa. Di wilayah itu, Kali Grogol yang dulu lebarnya 20 meter kini tersisa 2,5 meter. Secara topografi, kampung berada di ketinggian yang sama dengan air sungai. Akibatnya, air hujan mudah meluap ke permukiman warga.

"Selain itu, sanitasi warga juga masih buruk karena sebagian besar tidak punya *septic tank* dan masih membuang kotoran ke kali," kata Herman.

Wakil Wali Kota Jakarta Selatan Isnawa Adji mengatakan, jangan sampai program hanya meniru program sebelumnya dan tak berdampak ke warga. "Program penataan kali, misalnya, jangan hanya terbatas pada pemasangan turap beton. Coba contoh penataan kali di Korea Selatan. Kalau usulannya bagus dan realistis, pasti bisa dilaksanakan," ujarnya. (DEA)

Judul	Berita Foto	Tanggal	Jum'at, 2 Agustus 2019
Media	Kompas (Halaman 14)		
Resume	Labuan Bajo menjadi salah satu destinasi wisata utama di Indonesia.		

Destinasi Wisata



KOMPAS/PRIYOMBODO

Matahari terbenam di perairan Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur, Kamis (1/8/2019). Labuan Bajo menjadi salah satu destinasi wisata utama di Indonesia.

Judul	Berita Foto	Tanggal	Jum'at, 2 Agustus 2019
Media	Kompas (Halaman 13)		
Resume	PT Jasa Marga (Persero) Tbk menargetkan konstruksi jalan tol layang Jakarta-Cikampek II bisa selesai pada September 2019.		

Jalan Tol Layang Jakarta-Cikampek



KOMPAS/RIZA FATHONI

Pengerjaan konstruksi proyek jalan tol layang Jakarta-Cikampek II di kawasan Cikarang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Kamis (1/8/2019). PT Jasa Marga (Persero) Tbk menargetkan konstruksi jalan tol layang Jakarta-Cikampek II bisa selesai pada September 2019.

Judul	KEPADATAN JALUR PUNCAK: Jalan Baru Disiapkan	Tanggal	Jum'at, 2 Agustus 2019
Media	Bisnis Indonesia (Halaman 7)		
Resume	Kementerian PUPR serta Kementerian Perhubungan akan turun tangan mengurai kepadatan lalu lintas di jalur Puncak, Bogor. Dalam jangka panjang, akan ada penambahan jalan baru.		

► KEPADATAN JALUR PUNCAK

Jalan Baru Disiapkan

Bisnis, JAKARTA — Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) serta Kementerian Perhubungan akan turun tangan mengurai kepadatan lalu lintas di jalur Puncak, Bogor. Dalam jangka panjang, akan ada penambahan jalan baru.

Krizia Putri K.
krizia.putri@bisnis.com

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan, strategi yang sudah dan terus dilakukan adalah pelebaran jalur Puncak dan penataan pedagang kaki lima. Setelah itu baru memikirkan untuk membuat jalur baru.

"Strateginya kita perbaiki jalur Puncak, sekarang kita lebarkan dan ditata dulu. Makanya kita buka 5 hektare untuk memindahkan PKL. Jembatan-jembatan kita lebarkan, kalau itu sudah selesai kita pikirkan jalur Sentul—Kota Bunga," ujarnya di Jakarta, Kamis (1/8).

Basuki mengatakan untuk jalur baru Puncak terdapat sekitar 50 km tanah yang sudah siap. Namun, yang paling diutamakan adalah jalan eksisting Puncak dengan pertimbangan pengembangan daerah wisata.

Perbaikan jalur dan penataan ini sudah dimulai sejak 2 tahun lalu dan diperkirakan akan selesai pada 2020. "Jalur ini nantinya akan sangat efektif untuk mengurai kemacetan karena pasti memecah kepadatan lalu lintas yang ada," katanya.

SOLUSI PENGURAIAN

Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kemenhub, Budi Setiyadi sempat mengungkapkan pihaknya akan melakukan kajian lebih lanjut mengenai kemacetan di jalur Puncak, Bogor, mulai dari penyebab kemacetan, hingga kemungkinan solusi penguraiannya.

"Sebagaimana kita ketahui bersama, setiap akhir pekan pasti mengalami kemacetan, ramai. Bahkan mungkin puncaknya sekitar 3 minggu yang lalu saat terjadi kemacetan agak sedikit panjang," jelasnya baru-baru ini.

Dia diperintahkan Menteri Perhu-

► Untuk jalur baru Puncak terdapat sekitar 50 km tanah yang sudah siap. Namun, yang paling diutamakan adalah jalan eksisting Puncak dengan pertimbangan pengembangan daerah wisata.

bunga Budi Karya Sumadi untuk melakukan survei lebih lanjut terkait dengan potensi dan penyebabnya.

Selain itu, dia akan menyusun rencana penguraian dalam jangka pendek maupun panjang. Menurutnya, pihaknya masih melakukan survei dan akan melaporkan kepada Menhub pada pekan depan.

Menurutnya, penanganan jalur Puncak sudah tidak dapat lagi menggunakan pola-pola saat ini yang hanya melalui rekayasa lalu



lintas buka tutup jalan. Dengan begitu, perlu ada pola penguraian yang lebih baik lagi.

"Kami harus sudah melihat kepada pembangunan infrastruktur yang lain di sekitar Jalan Puncak II dan sekitarnya. Saya sudah membentuk kerja sama dengan Kementerian PUPR," jelasnya.

Dia mengatakan akan melakukan

survei bersama dengan Kementerian PUPR dan berkoordinasi sehingga dapat ditentukan solusi jangka panjangnya.

"Menurut saya perlu ada jalan baru, jangka panjang itu membuka jalur puncak yang dari Citeureup dan Jonggol. Jadi mobil-mobil yang dari Jakarta mau ke arah Cianjur tidak perlu lewat Puncak," katanya.

Dalam jangka panjang, terangnya, jalan baru akan dibangun di dua lokasi dan panjangnya bisa mencapai 100 km.

"Dari Jonggol sama dari Citeureup dua lokasi itu tapi masing-masing beda cara masuk, kemudian akses jalannya masih ada yang sempit, ada yang masih jurang, nanti kita tanyakan lagi ke Kementerian PUPR." ■

Judul	Astra Kaji Pembangunan Jalan Tol Plus Dermaga	Tanggal	Jum'at, 2 Agustus 2019
Media	Bisnis Indonesia (Halaman 7)		
Resume	Astra Infra, lini usaha PT Astra International Tbk. di sektor infrastruktur tengah mengkaji pembangunan jalan tol yang terintegrasi dengan dermaga penyeberangan di Merak, Banten.		

Astra Kaji Pembangunan Jalan Tol Plus Dermaga

Bisnis, JAKARTA — Astra Infra, lini usaha PT Astra International Tbk. di sektor infrastruktur tengah mengkaji pembangunan jalan tol yang terintegrasi dengan dermaga penyeberangan di Merak, Banten.

CEO Tollroad Business Group Astra Infra Krist Ade Sudyono mengatakan bahwa integrasi dengan dermaga dan moda penyeberangan bakal meningkatkan tingkat kelayakan investasi perpanjangan jalan tol Tangerang-Merak.

Berdasarkan studi yang dibuat oleh perseroan, volume lalu lintas pada ekstensi jalan tol sepanjang 5,5 km tidak akan optimal karena terbentur hambatan di Pelabuhan

Penyeberangan Merak.

"*Bottleneck*-nya bukan di jalan tol, tapi di dermaga. Usulan kami, di ujung jalan tol itu ada dermaga dan *multilayer deck*, sehingga *headway* kapal itu bisa 30 menit," jelasnya kepada *Bisnis*, pekan lalu.

Dia menggambarkan, dermaga susun (*multilayer deck*) memungkinkan pergerakan kendaraan dilakukan dalam jumlah banyak dengan waktu singkat. Walhasil, *port time* bisa terpankas sehingga interval kedatangan kapal bisa semakin singkat.

Krist memperkirakan volume lalu lintas angkutan penyeberangan bakal menanjak seiring dengan pengoperasian jalan tol Bakauheni—

Terbanggi Besar pada Maret 2019. Kemudian bakal menyusul dua ruas lain yaitu Terbanggi Besar-Pematang Panggang—Kayu Agung dan Kayu Agung—Palembang.

Walhasil konektivitas Bakauheni dengan Palembang bisa terhubung lewat jalan tol dan memangkas waktu tempuh menjadi lima jam. Prediksi peningkatan trafik ini, menurut Krist, membuat kapasitas dermaga perlu ditingkatkan guna menghindari kepadatan.

Krist menuturkan, pihaknya sudah menyampaikan kajian integrasi pembangunan jalan tol dengan dermaga ke Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT). Namun, dia mengakui, perusahaan

pelabuhan penyeberangan menjadi ranah dari Kemenhub.

Sebagaimana diketahui, jalan tol Tangerang-Merak sepanjang 72 kilometer berakhir di Pintu Tol Merak di KM 98. Pengguna jalan perlu menempuh perjalanan sepanjang 5,5 kilometer untuk tiba di Pelabuhan Penyeberangan Merak.

Pelabuhan Penyeberangan Merak memiliki tujuh dermaga, termasuk dermaga eksekutif yang baru dioperasikan PT ASDP Indonesia Ferry (Persero). Dermaga eksekutif ini menawarkan *port time* lebih singkat dan waktu berlayar lebih cepat dengan fasilitas terminal serupa di pusat perbelanjaan modern. (Rivki Maulana)

Judul	Berita Foto	Tanggal	Jum'at, 2 Agustus 2019
Media	Bisnis Indonesia (Halaman 7)		
Resume	Alat berat digunakan pada proyek jalan tol Serang–Panimbang di Kampung Cisangu, Lebak, Banten, Selasa (30/7).		

► **PROYEK JALAN TOL SERANG–PANIMBANG**



Antara/Muhammad Bagus Khoirunas

Alat berat digunakan pada proyek jalan tol Serang–Panimbang di Kampung Cisangu, Lebak, Banten, Selasa (30/7). Proyek pembangunan tol Serang–Panimbang sepanjang 83,6 km, progres keselu-

ruhnya telah mencapai 29,20% dan akan dirampungkan terlebih dahulu ruas tol dari Serang–Rangkasbitung sepanjang 26,50 km pada akhir tahun ini.

Judul	KAWASAN DANAU TOBA: 5 Embung Dibangun di Samosir	Tanggal	Jum'at, 2 Agustus 2019
Media	Bisnis Indonesia (Halaman 7)		
Resume	Untuk mendukung pengembangan KSPN Danau Toba, Sumatra Utara, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) membangun sejumlah infrastruktur pendukung dan pembangunan lima embung di Pulau Samosir untuk menambah pasokan air baku.		

5 Embung Dibangun di Samosir

Bisnis, JAKARTA — Untuk mendukung pengembangan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Danau Toba, Sumatra Utara, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) membangun sejumlah infrastruktur pendukung dan pembangunan lima embung di Pulau Samosir untuk menambah pasokan air baku.

Penyediaan sarana dan prasarana air bertujuan untuk ketahanan air dan kedaulatan pangan. Salah satunya pembangunan embung dengan kapasitas tampung antara 1.000 hingga 500.000 meter kubik dan kedalaman di bawah 15 meter,” kata Menteri PUPR Basuki Hadimuljono Rabu (31/7).

Kepala Balai Wilayah Sungai (BWS) Sumatera II Roy Pardede mengatakan, kelima embung itu adalah Embung Aek Natonang, Pea Parsinagaan, Pea Rihit, Pea Roba, dan Hairi Gorat. “Kelima

embung semuanya sudah selesai, ada yang tahun 2016, 2017, dan yang terakhir 2018 yaitu Embung Pea Parsinagaan,” ujarnya.

Embung Pea Rihit yang selesai dibangun pada 2017 berkapasitas tampung 35.000 meter kubik, dapat mengairi daerah irigasi seluas 200 hektare. Embung Pea Roba berkapasitas 30.000 meter kubik dapat mengairi 150 hektare sawah irigasi.

Selanjutnya, Embung Aek Natonang berkapasitas 100.000 meter kubik dapat mengairi 300 hektare sawah dan Embung Hairi Gorat berkapasitas 30.000 meter kubik dapat mengairi sawah 150 hektare.

Adapun, Embung Pea Parsinagaan berkapasitas 45.000 meter kubik dapat mengairi 250 hektare lahan irigasi. dengan Pekerjaan pembangunan embung dilengkapi dengan saluran pengelak (intake) dan pembuatan bangunan pelimpah saluran. *(Krizia Putri K)*

Judul	Atur Strategi demi Kejar Ambisi 7%	Tanggal	Jum'at, 2 Agustus 2019
Media	Bisnis Indonesia (Halaman 10)		
Resume	Dalam pepatah Jawa terkenal istilah <i>alon-alon waton kelakon</i> . Artinya kurang lebih bergerak perlahan tetapi pasti, atau tidak terburu-buru dalam bertindak.		

Atur Strategi demi Kejar Ambisi 7%

Dalam pepatah Jawa terkenal istilah *alon-alon waton kelakon*. Artinya kurang lebih bergerak perlahan tetapi pasti, atau tidak terburu-buru dalam bertindak.

Hafiyyan
hafiyyan@bisnis.com

Namun, kali ini Provinsi Jawa Tengah tampaknya harus menekan pedal gas lebih dalam untuk memacu Pertumbuhan Domestik Regional Bruto (PDRB). Tidak tanggung-tanggung, Jateng menargetkan pertumbuhan ekonomi hingga 7% pada 2023 atau dalam 5 tahun mendatang.

Asisten Ekonomi dan Pembangunan Pemrov Jateng Peni Rahayu menyampaikan, selain Jawa Timur, Jateng menjadi salah satu provinsi yang ditugaskan oleh pemerintah pusat untuk mendorong perekonomian nasional.

Pada 2023, pertumbuhan ekonomi Jateng ditargetkan mencapai 7%, melesat dari 2018 sebesar 5,32%. Untuk mencapai target PDRB itu, dalam waktu 5 tahun Jateng membutuhkan investasi sebesar Rp774 triliun.

"Ini komitmen kami yang memang tidak mudah. Karena, itu kami ingin memacu investasi ke Jateng, kami berkomitmen memudahkan perizinan dan pemberian insentif agar pelaku usaha merasa nyaman di sini," ujarnya kepada *Bisnis*, Selasa (30/7).

Bila melihat data historis, mengajar target pertumbuhan ekonomi 7% memang menantang.

Dalam 5 tahun terakhir atau periode 2014–2018, PDRB Jateng masing-masing tahun bertumbuh 5,27%, 5,7%, 5,28%, 5,27%, dan 5,32% saja. Data menunjukkan PDRB Jateng hanya sedikit di atas PDB nasional yang berkisar 5%.

Menarik investasi Rp774 triliun dalam 5 tahun mendatang juga bukan perkara enteng. Dengan hitung-hitungan sederhana, setidaknya investasi yang masuk ke Jateng diharapkan mencapai Rp154,8 triliun per tahun.

Data Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) mencatat realisasi investasi Jateng memang mengalami tren peningkatan.

Pada 2014–2018, gabungan Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) masing-masing mencapai Rp18,5 triliun, Rp26,04 triliun, Rp46,63 triliun, Rp51,5 triliun, dan Rp59,3 triliun.

Pada kuartal I/2019, realisasi investasi Jateng mencapai Rp21,42 triliun, dengan perincian PMA Rp11,65 triliun dan PMDN Rp9,76 triliun. Hasil itu membuat Jateng berada pada posisi ketiga terbesar dari realisasi investasi dibandingkan dengan provinsi lainnya, di bawah DKI Jakarta dan Jawa Barat.

Dengan realisasi investasi yang

menembus Rp50 triliun dalam 2 tahun terakhir, Jateng diharapkan bisa memacu kinerja hingga tiga kali lipat, agar investasi yang dibenamkan mencapai kisaran Rp150 triliun.

Peni menyampaikan Pemrov Jateng juga membuat sejumlah lokasi prioritas yang menarik bagi kelangsungan bisnis investor di samping mempermudah izin usaha. Lokasi tersebut ialah Kawasan Industri (KI) Kendal, Kawasan Industri Brebes, dan kawasan Candi Borobudur.

KI Kendal memiliki luasan sekitar 2.700 hektare (ha). Adapun, KI Cirebon sedang tahap penyiapan lahan dengan potensi luasan 4.000 ha.

Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menyampaikan, sejumlah investor dari berbagai sektor seperti produk alas kaki, elektronik, tekstil sampai makanan dan minuman berminat berinvestasi. Investor ingin membenamkan modal karena menganggap Jateng menguntungkan dari sisi bisnis.

"Beberapa [investor] yang sudah masuk relatif kerasan dengan kultur, dengan kinerja masing-masing. Nah, ini mereka melihat Jateng seksi banget untuk mereka berinvestasi," katanya.

Dalam menarik investasi, pemerintah perlu memberikan kenyamanan kepada para investor. Kenyamanan yang diberikan antara lain menjamin kondusivitas wilayah, memberi kemudahan, dan menerapkan insentif yang menarik.

BANGUN INFRASTRUKTUR

Di sisi lain, Pemrov Jateng berkomitmen memajukan sektor infrastruktur untuk mendukung konektivitas. Salah satunya ialah mempercepat pengembangan Jalan lingkar selatan selatan (JLSS) Jawa yang belum tertangani sepanjang 46,07 kilometer dari total panjang 211,95 kilometer.

Pembangunan jalan yang belum tertangani diusulkan agar dibiayai APBN. Untuk pembebasan lahan dibutuhkan anggaran senilai Rp1,17 triliun dan konstruksi sebesar Rp1,1 triliun.

Selain itu, dia akan mendorong percepatan pembangunan jalan tol Solo-Yogyakarta, tol Bawen-Yogyakarta, dan tol tanggul laut Semarang-Demak. Masing-masing proyek membutuhkan investasi senilai Rp22,5 triliun, Rp13,69 triliun, dan Rp15,4 triliun.

"Kami sudah siapkan secara detil, faktor yang bisa mendorong pertumbuhan. Sudah ada strategi yang disiapkan dan pekerjaan yang disiapkan," kata Ganjar.

Di bidang perkeretaapian, Jateng memiliki jalur melingkar yang bisa mendukung jalur transportasi penumpang dan bahan bakar gas untuk industri. Fasilitas Kereta Api



Kendaraan melintas di Simpang Susun Krapyak ruas jalan Tol Trans-Jawa, Semarang.

(KA), akan mendukung pembukaan kawasan industri di sisi selatan.

Menurut Ganjar, salah satu investor potensial yang akan masuk ke wilayah tersebut ialah perusahaan baja. Nilai investasi yang bakal digelontorkan senilai US\$2,54 miliar, atau Rp35 triliun.

Namun, dia menyatakan kebijakan perizinan belum seragam antara pemerintah provinsi dengan pusat. Oleh karena itu, Ganjar berharap adanya dukungan perizinan, sehingga industri tersebut dapat membantu memenuhi kebutuhan baja nasional.

Dalam mendukung tersedianya tenaga kerja untuk dunia usaha, Pemprov Jateng menyediakan fasilitas pendidikan dan pelatihan SDM. Ada 274 universitas dengan total kelulusan sekitar 103.000 orang per tahun dan 1.189 SMK dengan lulusan 150.000 siswa per tahun.

Ada pula Balai Latihan Kerja dengan lulusan sekitar 1.200 orang per tahun. Selain itu, pemerintah bakal mendirikan SMK yang berkolaborasi dengan Jerman.

Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia di Jawa Tengah Soekwardjo juga mengusulkan adanya pengembangan kawasan industri agar ekonomi Jateng kian maju.

Dua industri yang dapat didorong implementasinya adalah manufaktur baja dan kimia. Baja merupakan *mother of industry* atau *backbone*, karena hampir seluruh industri membutuhkan baja.

"Industri baja sangat penting keberadaannya untuk menunjang industri lain," tuturnya.

Adapun, sektor kimia berperan mendukung kebutuhan bahan baku industri tekstil, yang masih membutuhkan impor dalam jumlah besar. Apalagi industri tekstil sebelumnya sudah bertumbuh pesat di Jateng.

Di sisi lain, pemda juga dapat mengembangkan industri turisme, karena potensinya yang sangat besar. Seperti diketahui Jateng memiliki sejumlah destinasi wisata alam, budaya, agama, dan kota unggulan.

Kepala Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata (Disporapar) Jawa Tengah Sinung Nugroho Rachmadi menuturkan, Candi Borobudur, sebagai salah satu program "Bali Baru" menjadi magnet kuat pariwisata di Jateng.

Selain itu, Pemrov bersama pelaku usaha dan masyarakat turut mengembangkan destinasi wisata alternatif, seperti desa wisata.

"Jadi, kami menyediakan paket wisata. Magnetya Borobudur, tetapi wisatawan punya alternatif wisata lain setelah dari Borobudur," imbuhnya.

Tak main-main, pengembangan sektor pariwisata menargetkan kunjungan wisatawan mancanegara hingga 1,2 juta orang dan wisatawan domestik 56 juta orang per tahun.

AWASI DAMPAKNYA

Ekonomi Universitas Katolik Soegijapranata Andreas Lako menyampaikan, target pertumbuhan ekonomi sebesar 7% kurang realistis, dan bahkan dapat menjadi bumerang yang melukai diri sendiri.

Dalam 20 tahun terakhir, PDRB Jateng tertinggi ialah 6,24% pada 2012. Pada periode 2010–2013, PDRB memang cenderung meningkat di atas 6%. Namun, rasio gini melonjak hingga 0,39 pada 2013, yang menandakan tingginya kesenjangan ekonomi.

Saat itu, tingginya pertumbuhan ekonomi Jateng dinikmati kelompok kaya sebesar 20%. Artinya, kelompok mayoritas kalangan menengah dan bawah justru tidak terimbas efek melesatnya pereko-

nomian.

"Target 7% kurang realistis. Selain itu dapat menjadi bumerang karena berpotensi meningkatkan tingginya kesenjangan sosial, dan juga kerusakan lingkungan."

Selain itu, target investasi Rp774 triliun terbilang sangat tinggi. Ada tiga faktor yang dapat mendorong dana masuk, yakni peningkatan konsumsi rumah tangga, realisasi investasi, dan pertumbuhan ekspor.

Bila tiga faktor ini dapat dijamin oleh pemerintah, bukan tidak mungkin investasi semakin mengalir deras dan membuat ekonomi Jateng melaju, meskipun belum mencapai 7%.

Andreas menyarankan, agar pemerintah pusat dan daerah bersinergi untuk membahas target PDRB dan investasi tersebut agar berjalan tepat. Bila ingin memacu investasi, dana memang akan masuk dan menambah uang beredar di masyarakat.

Namun, jika permintaan baik ekspor dan domestik cenderung stagnan seperti saat ini, investasi tersebut menjadi mubazir. Akibatnya harga produk bisa turun dan keuntungan investor terpengkas.

"Ini perlu bersinergi, dipikirkan dan dikasih secara matang, agar sisi penawaran dan permintaan berimbang. Investasi harus tepat sasaran dan relevan," imbuhnya.

Di sisi lain, untuk memacu PDRB, pemerintah dapat berfokus meningkatkan sektor pendorong pertumbuhan ekonomi, seperti industri pengolahan, perdagangan, konstruksi, dan pertanian. Keempat sektor ini masih menjadi kontributor utama PDRB Jateng pada kuartal I/2019.

Jadi, apakah Jateng mampu mencapai target pertumbuhan ekonomi 7% dengan investasi Rp774 triliun? Semoga saja cita-cita tersebut tak semulut membangun Candi Borobudur kedua. (28)

Judul	Jalan Tol Cijago Seksi II Siap Dioperasikan	Tanggal	Jum'at, 2 Agustus 2019
Media	Koran Tempo (Metro Halaman 1)		
Resume	Pembangunan ruas jalan tol Cinere-Jagorawi (Cijago) seksi II sepanjang 5,5 kilometer telah rampung dan siap dioperasikan.		

Jalan Tol Cijago Seksi II Siap Dioperasikan

Pemerintah Kota Depok masih menyusun manajemen rekayasa lalu lintas untuk mengantisipasi kemacetan.
EDISI, 2 AGUSTUS 2019



Jalan Tol Rangsional Cinere - Jagorawi seksi II di kawasan Beji, Depok, 3 Juni lalu. TEMPO/IM Taufiq Rengganis

DEPOK - Pembangunan ruas jalan tol Cinere-Jagorawi (Cijago) seksi II sepanjang 5,5 kilometer telah rampung dan siap dioperasikan. Kesiapan ini bahkan sudah terlihat dalam uji coba pada Mei lalu saat digunakan untuk jalur mudik Lebaran. "Secara prinsip, kami tinggal menunggu diperintahkan saja oleh Kementerian PUPR (Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat) untuk mengoperasikannya," kata Direktur Utama PT Translingkar Kita Jaya (TLKJ), Hilman Muksin, kemarin.

Hilman mengatakan Pemerintah Kota Depok meminta pengoperasian ditunda karena ada sejumlah infrastruktur pendukung yang belum dibangun, antara lain jalan layang dan underpass di pintu keluar tol. Infrastruktur ini dibutuhkan agar tidak terjadi kemacetan. "Pemerintah pusat sepakat untuk membangun jalan pendukung itu," katanya.

Namun Hilman tidak mengetahui kapan pembangunan infrastruktur pendukung tersebut dimulai. Sebab, PT TLKJ tidak dilibatkan dalam perencanaan. "Itu kewenangan pemerintah pusat, kami tidak dilibatkan," kata Hilman.

Jalan tol Cijago adalah bagian dari proyek nasional Jalan Tol Lingkar Luar Jakarta 2 atau Jakarta Outer Ring Road (JORR) 2 sepanjang 111 kilometer. Jalan ini melingkar melintasi wilayah Bekasi, Bogor, dan Depok, dari Cilincing di Jakarta Utara hingga Cengkareng di Jakarta Barat.

Ruas jalan tol Cijago memiliki panjang 14,6 kilometer yang dibangun dalam tiga seksi. Seksi pertama sepanjang 3,7 kilometer menghubungkan jalan tol Jagorawi dengan Jalan Raya Bogor. Seksi pertama ini sudah dioperasikan sejak 2012. Sedangkan seksi kedua yang menghubungkan Jalan Raya Bogor dengan Kukusan sepanjang 5,5 kilometer sudah siap dioperasikan.

Pengoperasian seksi II jalan tol Cijago diharapkan bisa mengurai kemacetan di jalan arteri nasional non-tol, seperti Jalan Margonda, Jalan Juanda, kawasan Kukusan, dan Jalan Raya Bogor, menuju jalan tol Jagorawi. Adapun pembangunan seksi III sepanjang 5,4 kilometer, dari Kukusan hingga Cinere, masih berjalan.

Kepala Dinas Perhubungan Kota Depok, Dadang Wihana, mengatakan seksi II jalan tol Cijago sudah bisa dioperasikan antara Agustus dan September ini. "Masih dibahas intensif di pusat, yang jelas antara Agustus dan September," kata Dadang.

Menurut Dadang, dalam pembahasan ini, pemerintah Depok dan Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) juga menyusun manajemen rekayasa lalu lintas di pintu keluar tol. "Dua on-off ramp (pintu keluar tol) di Juanda dan Kukusan berpotensi menimbulkan titik kemacetan baru," katanya. "Pak Wali Kota sudah usul melalui surat resmi dan sudah direspons pusat."

Dadang mengatakan usul dari Wali Kota Depok Mohammad Idris itu adalah membangun flyover atau underpass di pintu keluar tol Jalan Juanda dan Kukusan.

Berdasarkan pantauan Tempo, dua lajur di jalan tol Cijago seksi II sudah dipasang rambu lalu lintas. Pintu jalan tol itu juga dilengkapi dengan gardu otomatis dan ruang operator. Plang tarif jalan tol sudah dipasang, tapi belum mencantumkan tarif untuk setiap golongan kendaraan. "Tarif akan diumumkan setelah tol diresmikan untuk dioperasikan," kata Hilman Muksin. **ADE RIDWAN YANDWIPUTRA | SUSENO**